

Judul : Netizen Soroti Rencana Vaksinasi Booster, Anggota DPR Dan Pejabat Negara Bayar Sendiri Ya...
Tanggal : Rabu, 10 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Netizen Soroti Rencana Vaksinasi Booster

Anggota DPR Dan Pejabat Negara Bayar Sendiri Ya...

Netizen menyoroti soal masyarakat yang mampu kudu bayar untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis booster. Yang gratis cuma Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadadi Sadikin mengatakan, vaksinasi booster akan diprioritaskan bagi lansia dan PBI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara yang akan ditanggung negara alias gratis, kata Budi, adalah PBI BPJS Kesehatan.

"Jadi mohon maaf, Bapak Ibu anggota DPR yang penghasilannya cukup, nanti bayar sendiri," kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/11).

Budi mengatakan, masyarakat yang masuk kategori vaksinasi booster berbayar bisa memilih jenis vaksin. Saat ini, para pakar tengah menganalisis jenis vaksin Covid-19 yang bisa diberikan untuk booster. Baik, vaksin campuran maupun yang sama jenis atau istilahnya *homologous* dan *heterologous*.

"Contohnya, Sinovac-Sinovac-Sinovac, lalu Sinovac-Sinovac-AstraZeneca, dibandingkan Sinovac-Sinovac-Pfizer," jelas Budi.

Budi mengatakan, vaksinasi booster direncanakan dimulai jika 50 persen penduduk sudah mendapatkan 2 dosis suntikan vaksin Covid-19. Diperkirakan, target tersebut

akan tercapai Desember 2021.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, vaksinasi booster baru bisa dilakukan paling cepat Maret 2022. Soalnya, masih menunggu uji klinis tentang pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga.

"Pemerintah masih harus mempelajari teknis pemberian booster vaksin Covid-19. Seperti interval atau jarak waktu pemberian dosis dua dengan dosis ketiga, hingga penetapan jenis atau merek vaksin yang cocok," ujarnya.

Nadia menegaskan, pemerintah saat ini masih fokus menyelesaikan target sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Dia mengingatkan, proteksi secara kelompok hanya akan terjadi apabila mayoritas warga sudah mendapatkan vaksin. "Vaksinasi Covid-19 ini tidak melalui bersifat individual," tandas Nadia.

Netizen setuju, para pejabat dan anggota DPR harus membayar jika ingin vaksinasi booster. Begitu pun dengan masyarakat yang mampu, harus membayar.

Akun @oglex1 mengatakan, anggota DPR

dan pejabat lain yang berkecukupan, sudah selayaknya membayar untuk vaksinasi booster. "Setuju, sudah semestinya mereka yang banyak duit bayar dong," ujarnya.

Akun @arkhami tidak yakin anggota DPR mau membayar vaksin booster. Dia memprediksi, pada akhirnya anggota DPR dan para pejabat bakal dapat vaksin gratisan.

"Dahinya, pejabat dan garda terdepan pelayanan. Kalaupun bayar ditanggung negara," tuturnya.

Akun @potatoheal sudah tidak sabar menunggu vaksinasi booster. Dia berharap, kabar itu semakin jelas.

"Ayo dipercepat saja Pak Menkes, keburu expired nanti," pinta @Newnormalbulsh1.

Akun @bintang.lombok.351 meminta pemerintah memperluas penerima vaksin booster gratis. Kata dia, para pembayar iuran mandiri BPJS juga layak mendapatkan vaksin booster gratis.

Pada akhirnya, kata @Dhikaral, semua warga masyarakat dianggap mampu. Sehingga, bagi masyarakat yang ingin vaksinasi booster harus bayar.

"Kasihlah orang yang nggak punya BPJS ya. Gajinya dikit tapi harus bayar sekeluarga. Nggak disubsidi lagi," kata @RennyJisun25.

"Nasibku sudah nggak di-cover BPJS Kesehatan sejak dua tahun lalu," sambung @SukanyaMeTime.

Akun @Iereynerk tidak mempermasalahkan vaksin booster untuk rakyat biasa harus berbayar. Terlebih, vaksin Covid-19 dosis booster hanya sebagai alternatif saja bagi yang mau. "Bayar nggak apa-apa Pak asal resmi di Kimia Farma," tuturnya.

Senada diungkapkan @agthlia. Dia sangat setuju ada layanan vaksinasi booster, meski harus berbayar. Lebih baik ada opsi berbayar daripada menunggu gratisan tapi tidak tahu kapan dapatnya. "Iya, lebih baik bayar tapi jelas," sambut @Vikkristian12.

Akun @hadipurnomosetanto mengatakan, pemerintah harus bisa menjaga ketersediaan dan harga vaksin booster. Dengan begitu, semua kalangan dapat berpartisipasi melakukan booster secara mandiri.

"Jangan nanti ada permainan sehingga barang menjadi langka dan harga tidak terkendali," tuturnya.

Akun @drpriono1 meminta pemerintah jangan terlalu sibuk memikirkan vaksinasi booster. Saat ini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menggenjot vaksinasi, khususnya dosis kedua.

Akun @drpriono1 mengatakan, ide vaksinasi booster karena saat itu imunitas menurun dan kasus Covid meningkat saat Delta mengamuk. Kini, Indonesia mengalami penurunan kasus, walaupun cakupan vaksinasi belum terlalu tinggi. ■ASI